

INDUSTRI & PERDAGANGAN

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pemerintah Upayakan Jaga Pasar Sawit di Pakistan

NERACA

Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Islamabad berupaya mengamankan pangsa pasar sawit Indonesia di Pakistan karena permintaan produk minyak sawit meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi di negara tersebut.

"Kedudukan Pakistan sebagai pasar prospektif minyak sawit Indonesia perlu dipertahankan," kata Duta Besar RI untuk Pakistan Iwan Suyudhie Amri, dalam keterangan pers KBRI Islamabad yang dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Implementasi efektif "Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement" (IP-PTA) pada 2013 telah memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendominasi pasar sawit Pakistan dan mendapatkan surplus perdagangan.

Namun, menurut pihak KBRI Islamabad, keuntungan yang diraih Indonesia dalam perdagangan kelapa sawit di Pakistan saat ini memerlukan pengamanan. Hal itu karena pemerintah Pakistan sedang mengkaji langkah penerapan hambatan non-tarif pada produk kelapa sawit Indonesia.

"Dalam upaya memperkecil defisit perdagangan dengan Indonesia, Pakistan kini tengah menggodok rencana penerapan hambatan non-tarif bagi produk asal Indonesia tersebut. Langkah ini ditempuh dengan dalih Indone-

sia telah melakukan hal yang serupa terhadap produk unggulan Pakistan," ujar Dubes Iwan.

Sementara itu, Malaysia yang merupakan pesaing utama Indonesia sedang mencari celah merebut pasar minyak sawit Indonesia di Pakistan yang mencapai 87 persen. "Malaysia sebagai pemain besar minyak sawit di Pakistan sedang mengkaji ulang perjanjian perdagangan bebasnya dengan Pakistan, dengan kemungkinan menurunkan tarif impor minyak sawit asal Malaysia," ungkap Iwan.

Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, pada awal Januari 2017 Dubes RI Iwan Suyudhie Amri menemui beberapa pihak di Indonesia, antara lain wakil menteri luar negeri, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan, Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, dan para wakil asosiasi pelaku usaha sawit Indonesia.

Dalam pertemuan itu, semua pemangku kepentingan sepakat untuk bersama menjaga dan meningkatkan posisi minyak sawit Indonesia di Pakistan. Dirjen PPI sebagai negosiasi perundingan perdagangan Indonesia mendukung upaya Dubes RI dan menyatakan pihaknya akan mengirimkan pejabat senior pada "Pakistan Edible Oil Conference" (PEOC) di Karachi pada 21 Januari 2017, dan akan memimpin langsung Delegasi RI melakukan per-

temuan kedua Review Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) di Islamabad pada pertengahan Februari 2017.

PEOC akan menjadi ajang peningkatan sikap saling memahami (*mutual understanding*) antara pelaku usaha sawit kedua negara. Untuk itu, Kemendag dan BPDP menyambut positif PEOC sebagai forum strategis pengembangan bisnis sawit dan akan mengirim 20 delegasi menghadiri konferensi itu. Dubes RI mendorong berbagai lini, baik pemerintah maupun kalangan usaha kedua negara, untuk mengamankan dan memelihara posisi pasar minyak sawit Indonesia di Pakistan. Langkah mengamankan sawit Indonesia di Pakistan juga ditempuh lewat berbagai program lain.

"Pembukaan kantor perwakilan sawit Indonesia di Pakistan, pembangunan tempat penampungan di Karachi, pembentukan Indonesia-Pakistan Palm Oil Friendship, maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR) para eksportir merupakan bentuk totalitas KBRI Islamabad untuk memelihara keunggulan sawit Indonesia di Pakistan serta menciptakan hubungan perdagangan berkelanjutan Indonesia-Pakistan," ungkap Dubes Iwan.

Pada 2015, volume ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya mencapai 26,40 juta ton dan menghasilkan devisa sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat (AS). 



PRODUKSI KERUPUK KEDELAI : Perajin menjemur kerupuk di Sentra Industri Kerupuk Kedelai Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/1). Kalangan perajin setempat mengeluhkan produksi kerupuk kedelai seharga Rp10.000 per kilogram tersebut menurun hingga 60 persen selama dua bulan terakhir karena intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan proses pengeringan tidak maksimal.

PASCA PENERBITAN PP NO. 1/2017

Dampak Ekspor Biji Mentah Nikel Bakal Negatif ke Industri?

Jakarta - Presiden Direktur PT Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan dibukanya keran ekspor biji mentah nikel (terbatas pada nikel berkadar rendah) dapat berdampak negatif terhadap industri nikel yang tengah berkembang di Indonesia. Harga nikel disebut langsung turun.

NERACA

Setelah terbitnya peraturan ini (PP No 1 tahun 2017), harga nikel sudah langsung menurun, di mana penurunan harga nikel ini diperkirakan akan berkepanjangan, dan akan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan smelter di Indonesia dan juga pada pendapatan pemerintah dari sektor nikel, kata Nico Kanter sebagaimana disalin dari kantor berita Antara.

Ia juga mengatakan kewajiban menyerap bijih dengan kadar rendah akan meningkatkan unit biaya produksi smelter, dan hal tersebut akan mengakibatkan operasional smelter menjadi kurang kompetitif. Di samping itu, kendala lain yang mungkin terjadi menurutnya adalah dari sisi pengawasan dan penegakan hukum yang dapat menjadi salah satu kendala praktik ekspor tidak hanya terbatas pada jumlah ter-

tentu dan bijih nikel kadar rendah saja. Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan akan terjadi kelebihan pasokan (*over supply*) dan pada akhirnya berdampak pada penurunan harga nikel yang signifikan.

Nico menjelaskan investasi smelter membutuhkan modal yang besar dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Tanpa konsistensi kebijakan, dukungan fasilitas dan juga kondisi harga mineral yang baik, akan sulit sekali untuk berinvestasi.

"Kami akan senantiasa berdiskusi dengan pemerintah dalam upaya agar interpretasi dan implementasi peraturan ini akan sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk memberikan manfaat yang besar untuk semua pemangku kepentingan," katanya.

Ia menyapaikan informasi sejak pemerintah menerbitkan larangan ekspor bijih nikel, beberapa smelter nikel telah berproduksi dan,

dalam jumlah yang lebih banyak lagi, smelter-smelter baru tengah dibangun di Indonesia. Mayoritas smelter-smelter ini akan menghasilkan produk "*nickel pig iron*" (NPI) dan berkompetisi dengan produsen NPI maupun ferronikel di luar Indonesia, terutama di Cina.

Dari sudut pandang kapasitas produksi smelter, posisi Indonesia telah meningkat dari peringkat 4 di dunia pada tahun 2015 menjadi peringkat 3 pada tahun 2016 dan, dengan laju pembangunan smelter seperti saat ini, Indonesia diperkirakan akan mencapai tingkat pertama di dunia pada tahun 2017.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017. Di antaranya adalah penghapusan ketentuan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang telah melakukan pemurnian dapat menjual hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Tujuan utama dari PP tersebut adalah guna melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dalam UU Nomor 4/2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengancam akan mencabut izin ekspor konsentrat atau mineral mentah bagi perusahaan tambang yang menunda membangun fasilitas pengolahan pemurnian mineral (smelter). Bila dalam jangka lima tahun smelter belum selesai maka izin tidak akan diperpanjang.

"Harus membangun smelter jika mau ekspor konsentrat, atau dalam proses dalam jangka lima tahun, hal itu juga harus dipertegas dengan pernyataan bermeteterai. Kalau tidak, akan saya cabut izinya," tegas Jonan sebagaimana disalin dari Antara, akhir pekan lalu.

Apabila dalam jangka lima tahun smelter belum selesai maka izin tidak akan diperpanjang. Selain itu, bagi perusahaan pertambangan yang masih berstatus Kontrak Karya (KK) juga harus mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika akan melakukan ekspor konsentrat. "Kalaupun sudah IUPK, tapi tidak ada perkembangan smelter, juga belum tentu pengajuan perpanjangan kontrak diizinkan. Pengajuan IUPK dan perpan-

jang adalah hal yang berbeda, jadi harus diajukan dua-duanya," kata Jonan.

Jonan juga menyaratkan bea keluar untuk ekspor konsentrat paling tidak maksimum 10 persen sesuai progres fisik dan realisasi pembangunan smelter. Kebijakan Jonan tersebut terkait dengan telah selesainya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam merupakan upaya dalam mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Selain itu juga bertujuan memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Pemerintah secara bertahap juga akan menasionalisasi perusahaan pertambangan untuk divestasi saham hingga 51 persen. 

Industri Jepang Didorong Perkuat Rantai Pasok di Indonesia

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian mendorong industri asal Jepang yang ada di Indonesia agar memperkuat rantai pasoknya sehingga akan membantu mengatasi permasalahan kebutuhan bahan baku di dalam negeri. Untuk itu, diharapkan peningkatan investasi dari perusahaan-perusahaan Negeri Sakura tersebut.

"Kami berharap industri-industri dari Jepang, seperti yang bergerak di bidang pengolahan mineral logam, pembangkit listrik, gasifikasi batu bara, petrokimia, dan kaca dapat berinvestasi di Indonesia pada lokasi-lokasi kawasan industri yang telah disiapkan," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Business Meeting between Japan and Indonesia di Jakarta, sebagaimana disalin dari

keterangan resmi.

Kawasan industri itu, antara lain Kawasan Industri Dumai di Riau yang telah dilengkapi pembangkit listrik dengan kapasitas 50 MW, terminal CPO dan pengolahan limbah. Kawasan ini dapat digunakan untuk pengembangan industri gasifikasi batu bara dan *oleo chemical*.

"Kami juga menawarkan kawasan Industri JIPE di Gresik dengan total area seluas 2.933 Ha serta didukung power plants sebesar 23 MW dan 500 MW. Kawasan yang dilengkapi dengan residential area dan pelabuhan ini didorong sebagai kawasan untuk *heavy industry* dan permesinan," tutur Airlangga.

Selanjutnya, Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah dengan luas sebesar 2.700 Ha yang lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Semarang. Di kawasan ini, rencananya akan dibangun industri furni-

ture, industrimakanan dan industri garmen. "Dengan upah buruh yang kompetitif, maka kawasan industri ini akan memiliki keunggulan dibanding kawasan lain," ujar Airlangga.

Menperin juga menawarkan Lokasi Kawasan Industri Bontang di Kalimantan Timur. "Kawasan ini akan dikembangkan untuk industri gasifikasi batu bara. Dengan didukung area seluas 265,6 Ha, saat ini sedang dibangun industri gas minyak dan gas di kawasan tersebut," terangnya.

Bahkan, Kemenperin mendorong pula pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Jepang agar ikut berinvestasi di Indonesia. "Kami ingin membantu agar makin banyak investasi IKM dari Jepang di Indonesia. Ke depannya, IKM Jepang ini akan dimitratikan dengan IKM-IKM yang ada di Indonesia untuk penguatan dan *upgrading* produk. 

Kementan Imbau Konsumen Tak Risau Harga Cabai

NERACA

Jakarta - Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengimbau masyarakat agar jangan risau dengan masalah cabai seperti yang ramai diberitakan akhir-akhir ini. "Masalah cabai ini sebenarnya hanya karena faktor kelangkaan, dan bisa diatasi hanya melibatkan ibu rumah tangga," kata Amran Sulaiman, saat rapat koordinasi ketahanan pangan Sulawesi Tenggara (Sultra), di Kendari, pekan lalu, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Mentan mengatakan, kalau semua ibu rumah tangga di Indonesia mau mengurangi waktu bergosipnya selama lima menit kemudian menanam lima pohon cabai di polybag, makalah masalah cabai ini tuntas dan tidak perlu ketetapan seperti saat ini.

"Cabai itu ada beberapa jenisnya, dari sekitar lima jenis cabai hanya jenis cabai rawit yang naik harganya, sedangkan cabai jenis lain itu-ibu bisa memanfaatkan di pekarangan menanam lima pot saja, tuntas ini masalah," katanya pula.

Mentan berada di Sultra selama hari yakni Rabu

gaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Mentan mengatakan, kalau semua ibu rumah tangga di Indonesia mau mengurangi waktu bergosipnya selama lima menit kemudian menanam lima pohon cabai di polybag, makalah masalah cabai ini tuntas dan tidak perlu ketetapan seperti saat ini.

"Cabai itu ada beberapa jenisnya, dari sekitar lima jenis cabai hanya jenis cabai rawit yang naik harganya, sedangkan cabai jenis lain itu-ibu bisa memanfaatkan di pekarangan menanam lima pot saja, tuntas ini masalah," katanya pula.

Mentan berada di Sultra selama hari yakni Rabu

(11/1) melakukan panen pedesaan Bali di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada Kamis (12/1) melakukan penanaman perdana jagung hibrida di Kabupaten Konawe Utara, dan hari ketiga ini melaksanakan rakor ketahanan pangan se-Sultra di Kendari.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penanaman perdana jagung hibrida di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) atau sekitar 190 kilometer arah utara Kota Kendari, Kamis pekan lalu.

Penanaman jagung unggul itu juga dihadiri Pangdam VII Wirabuna Mayjen TNI Agus Surya Bakti dan Sekda Provinsi Sultra Lukman Abunawas, Anggota Komite III DPD RI asal Sultra Waode Hamsina Bolu dan Bupati Konut Rukhsamin serta sejumlah pejabat eselon I dan II Kementerian Pertanian dan beberapa pengusaha nasional yang mendampingi Menteri.

Menurut menteri, program penanaman jagung hibrida dalam rangka mendukung produksi jagung nasional yang sekaligus bisa

menutupi keran impor jagung selama ini. "Kalau sudah ada tambahan produksi jagung, kita bisa mengurangi impor. Impor jagung kita tahun ini turun kurang lebih tiga juta ton, itu nilainya Rp7 triliun - Rp8 triliun, padahal baru sekali gerak," ujar Amran, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia mengatakan, program penanaman jagung di Konawe Utara dipilih karena memiliki lahan yang masih cukup luas, terutama lahan-lahan tidur yang tidak pernah diolah selama ini. "Saya targetkan di Konawe Utara, penanaman jagung hibrida harus mencapai 10.000 hektare di tahun 2017 ini," ujarnya seraya menambahkan, bila masyarakat Konut bisa menanam jagung seluas 10.000 hektare maka tahun berikutnya pemerintah pusat akan membantu lagi dua kali lipat.

Program penanaman jagung hibrida merupakan program nasional dan merupakan perintah Presiden Joko Widodo, sehingga wajar bila masyarakat khususnya di Konawe Utara mendukung program swasembada jagung nasional. 

menutupi keran impor jagung selama ini. "Kalau sudah ada tambahan produksi jagung, kita bisa mengurangi impor. Impor jagung kita tahun ini turun kurang lebih tiga juta ton, itu nilainya Rp7 triliun - Rp8 triliun, padahal baru sekali gerak," ujar Amran, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia mengatakan, program penanaman jagung di Konawe Utara dipilih karena memiliki lahan yang masih cukup luas, terutama lahan-lahan tidur yang tidak pernah diolah selama ini. "Saya targetkan di Konawe Utara, penanaman jagung hibrida harus mencapai 10.000 hektare di tahun 2017 ini," ujarnya seraya menambahkan, bila masyarakat Konut bisa menanam jagung seluas 10.000 hektare maka tahun berikutnya pemerintah pusat akan membantu lagi dua kali lipat.

Program penanaman jagung hibrida merupakan program nasional dan merupakan perintah Presiden Joko Widodo, sehingga wajar bila masyarakat khususnya di Konawe Utara mendukung program swasembada jagung nasional. 



RED PLANET INDONESIA

Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)

Sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Red Planet Indonesia Tbk ("PSKT") tanggal 14 Desember 2016 yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal (stock split) atas saham Perseroan semula sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham serta mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Januari 2017, berikut disampaikan jadwal pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split):

No	Kegiatan	Tanggal
1	Iklan pengumuman jadwal dan tata acara pelaksanaan <i>stock split</i>	17 Januari 2017
2	Akhir perdagangan saham dengan Nilai Nominal Lama (Nominal Rp 500,- per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Januari 2017
3	Awal perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru (Nominal Rp 100,- per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 Januari 2017
4	• Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama Rp 500,- • Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) • Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp 100,- • Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru Rp 100,- per saham.	27 Januari 2017
5	• Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp 100,- per saham.	30 Januari 2017

Catatan :

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham akan dilakukan berdasarkan jumlah saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Januari 2017. Pada tanggal 25 Januari 2017, saham hasil pelaksanaan pemecahan nilai nominal akan didistribusikan melalui sub rekening efek pemegang saham di KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warrant, permohonan saham dengan nilai nominal baru dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2017 dengan menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu:

PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Lantai 2
Jl Jenderal Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel : 6221 2525666
Fax : 6221 2525028

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Dengan ini PT HEFAN INDONESIA SUBUR berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "PERSEROAN") dengan ini mengumumkan rencana disadakannya penjualan/pengembalian sebagian besar hak atas saham-saham dalam Perseroan milik Nyonya ERVINA DANIRY kepada Tuan WANG YUEJUN serta seluruh saham milik Tuan WANG XIANGYANG kepada Tuan DU, MIN, Tuan ZHANG YONGGUAN, Tuan WANG YUEJUN, Tuan RICKY TJOK. Bagi pihak-pihak yang memiliki piutang atau tagihan terhadap Perseroan atau keberatan atas pengalihan tersebut harap menyampaikan secara tertulis serta bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini.

Dengan tembusan kepada :

- Dirjen AHU Kemendikhumas Gedung Sentra Mulia, Jl.Rasuna Said kav x/6/8, Lt. 3/6, Jakarta Selatan, dan
- Kantor Notaris Intan Duniarti, S.H., M.Kn., beralamat di -Perumahan Permata Tangerang Blok DA-12/17, Gelamajaya, Pasar Kermis, Tangerang.

Tangerang, 17 Januari 2017
Direksi PT HEFAN INDONESIA SUBUR
d/j a - J. Diklat Penda Lingkungan Berlian 88, Biz Estate @ Karawaci, Kp. Dukuhpang RT. 01/02, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan bahwa sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT BHP BILLITON SERVICES INDONESIA (dalam likuidasi) ("Perseroan") tertanggal 09 Desember 2016 dan dengan "Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT BHP BILLITON SERVICES INDONESIA" Nomor 14 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris IRENERA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan dengan memperhatikan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), para pemegang saham Perseroan dengan ini telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Membubarkan dan melikuidasi Perseroan efektif sejak tanggal 19 Desember 2016; dan
2. Mengangkat PT Prima Wahana Caraka untuk bertindak sebagai likuidator Perseroan.

Sehubungan dengan keputusan Perseroan diatas, pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun tagihan terhadap Perseroan dan ingin mengajukan tagihan tersebut kepada pengaju tagihan tertulis kepada Likuidator ke alamat dibawah ini :

PT PRIMA WAHANA CARAKA u.p. Adi Pratikto
PT BHP BILLITON SERVICES INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)
Plaza 89, 4th Floor JI. H.R. Rasuna Said Kav.7 No.6 Jakarta Selatan 12910.

Surat tertulis tersebut disampaikan bersama dengan bukti yang mendukung tagihan dimaksud, dan dikirimkan kepada Likuidator Perseroan paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini sesuai dengan UUPT.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT.

Jakarta, 27 Desember 2016
Likuidator dari PT BHP BILLITON SERVICES INDONESIA (dalam likuidasi)